

Kesantunan Berbahasa Terhadap Nilai Budaya Suku Bugis-Makassar: Suatu Telaah Sosiopragmatik

Rusdi Room^{1*}

^{1*}Program Studi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia)
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, 92113

E-mail Korespondensi: rusydyroom@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis praktik kesantunan berbahasa dalam kaitannya dengan nilai budaya masyarakat Bugis-Makassar, khususnya nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi/Siakalabbiri*, *Siri'*, dan *Pangngaderreng/Pangngadakkang*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain sosiopragmatik yang dipadukan dengan perspektif etnografi komunikasi. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi tuturan dalam ranah keluarga dan pendidikan di Sulawesi Selatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi strategi kesantunan, serta interpretasi kontekstual menggunakan teori kesantunan Penelope Brown dan Stephen C. Levinson yang dikontekstualisasikan dengan konsep harga diri kolektif dalam budaya Bugis-Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kesantunan berbahasa masih merefleksikan sistem nilai budaya lokal yang kuat. Sistem sapaan, penggunaan bentuk honorifik, serta strategi komunikasi tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme menjaga *face* dan martabat sosial. Nilai *Siri'* terbukti menjadi landasan utama dalam mengontrol perilaku tutur dan menjaga harmoni sosial, sementara prinsip *Sipakatau* dan *Sipakalebbi* memanifestasi dalam pilihan leksikal yang menunjukkan penghormatan dan pemuliaan terhadap mitra tutur. Namun demikian, modernisasi, pergeseran pola interaksi, serta berkurangnya penggunaan bahasa daerah berimplikasi pada melemahnya internalisasi nilai kesantunan pada sebagian generasi muda. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman praktik kesantunan dalam masyarakat Bugis-Makassar memerlukan integrasi antara teori kesantunan universal dan kerangka nilai budaya lokal. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiopragmatik berbasis kearifan lokal, sedangkan secara praktis memberikan dasar konseptual bagi penguatan pendidikan karakter dan pelestarian budaya melalui praktik komunikasi yang beretika.

Kata Kunci: Kesantunan Berbahasa, Budaya Bugis-Makassar, *Siri'*, Sosiopragmatik, Kearifan Lokal

Abstract

This study aims to describe and analyze the practice of linguistic politeness in relation to the cultural values of the Bugis-Makassar community, particularly the values of Sipakatau, Sipakalebbi/Siakalabbiri, Siri', and Pangngaderreng/Pangngadakkang. The research employs a qualitative approach with a sociopragmatic design integrated with an ethnography of communication perspective. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation of speech events within family and educational settings in South Sulawesi. Data analysis involved data reduction, categorization of politeness strategies, and contextual interpretation using the politeness theory of Penelope Brown and Stephen C. Levinson, contextualized within the concept of collective dignity embedded in Bugis-Makassar culture. The findings indicate that linguistic politeness practices continue to reflect strong local cultural values. Address systems, honorific expressions, and indirect communication strategies function as mechanisms for maintaining face and social dignity. The value of Siri' serves as the primary foundation for regulating speech behavior and preserving social harmony, while the principles of

Sipakatau and Sipakalebbi are manifested in lexical choices that convey respect and honor toward interlocutors. However, modernization, shifting interaction patterns, and the declining use of local languages have contributed to the weakening internalization of politeness values among some younger generations. This study underscores that understanding politeness practices within the Bugis-Makassar community requires the integration of universal politeness theory and local cultural frameworks. Theoretically, this research contributes to the development of sociopragmatic studies grounded in local wisdom, while practically it provides a conceptual foundation for strengthening character education and cultural preservation through ethical communication practices.

Keywords: *Linguistic Politeness, Bugis-Makassar Culture, Siri', Sociopragmatics, Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai representasi nilai dan identitas budaya suatu masyarakat. Dalam praktiknya, penggunaan bahasa selalu terikat pada norma dan sistem nilai yang berlaku dalam komunitas penuturnya. Kesantunan berbahasa, misalnya, tidak bersifat universal, melainkan dikonstruksi oleh nilai-nilai budaya yang melingkupinya. Apa yang dianggap santun dalam satu masyarakat dapat berbeda secara signifikan dengan standar kesantunan dalam masyarakat lain. (Haugh, 2003) menegaskan bahwa kesantunan merupakan fenomena sosial yang bergantung pada konteks budaya dan interpretasi kolektif masyarakat penutur. Dengan demikian, kesantunan berbahasa tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas budaya tertentu.

Secara pragmatik, kesantunan berbahasa dipahami sebagai strategi komunikasi untuk menjaga keharmonisan sosial. Penelope Brown & Levinson (1978) melalui teori *politeness* menyatakan bahwa setiap individu memiliki "face" (air muka atau harga diri) yang harus dijaga dalam interaksi sosial. Strategi kesantunan digunakan untuk meminimalkan ancaman terhadap *face*

tersebut sehingga relasi sosial tetap harmonis. Dalam konteks ini, kesantunan berbahasa bukan sekadar pilihan stilistika, melainkan praktik sosial yang mencerminkan penghargaan terhadap martabat diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, penggunaan bahasa yang santun merupakan wujud konkret dari upaya menjaga marwah serta membangun hubungan interpersonal yang seimbang.

Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam kajian antropologi budaya, sistem tersebut dikenal sebagai *cultural values* atau nilai-nilai budaya. Nilai budaya merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, benar, dan pantas dalam kehidupan kolektif. Nilai ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, tetapi terinternalisasi dalam kesadaran anggota masyarakat dan membentuk pola perilaku sosial. Karena sifatnya yang normatif dan mengikat, nilai budaya menjadi landasan etis dalam praktik komunikasi, termasuk dalam menentukan bentuk dan strategi kesantunan berbahasa.

Pendekatan sosiopragmatik memandang bahwa penggunaan bahasa dalam interaksi tidak berdiri secara netral, melainkan sangat dipengaruhi

oleh aturan sosial dan kesepakatan budaya yang hidup dalam suatu komunitas tutur (Taufiq et al., 2026). Bahkan, kesantunan berbahasa tidak bersifat mutlak, tetapi relatif dan bergantung pada konteks karena ditentukan oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat penuturnya (Laini & Budiyo, 2025). Dengan demikian, pemilihan strategi kesantunan maupun perwujudan tindak tutur selalu terkait erat dengan kondisi sosial dan latar budaya di mana praktik komunikasi itu berlangsung.

Dalam konteks masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, praktik kesantunan berbahasa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal, seperti *Sipakatau* (saling memmanusiakan), *Sipakalebbi/Siakalabbiri* (saling memuliakan), dan *Siri'* (harga diri atau martabat). Bahkan, dalam konteks masyarakat Bugis, bahasa berfungsi sebagai esensi instrumen dalam mengatur hubungan sosial sekaligus menjaga kehormatan individu dan kelompok. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar simbol budaya, melainkan prinsip moral yang mengatur relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Konsep '*Siri'*', misalnya, berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan individu dan komunitas. Pelanggaran terhadap norma kesantunan tidak hanya dipandang sebagai kesalahan linguistik, tetapi juga sebagai pelanggaran etika yang dapat mencederai martabat pribadi maupun kolektif. Dengan demikian, praktik kesantunan berbahasa dalam masyarakat Bugis-Makassar tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme linguistik, tetapi juga mengandung dimensi sosial, moral, dan kultural yang kuat.

Dalam setiap interaksi, penutur dituntut menyesuaikan pilihan bahasa dan strategi tutur dengan norma serta sistem nilai yang berlaku agar tercipta komunikasi yang selaras dan menjaga keharmonisan hubungan sosial (Room & Syukriady, 2024). Urgensi penelitian ini semakin relevan dalam konteks perubahan sosial yang ditandai oleh globalisasi, mobilitas sosial, dan penetrasi media digital. Interaksi lintas budaya yang semakin intensif berpotensi menggeser pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kesantunan tradisional. Apabila nilai budaya tidak direvitalisasi melalui pendidikan dan praktik sosial, maka dikhawatirkan akan terjadi erosi terhadap norma kesantunan yang selama ini menjadi identitas kultural masyarakat Bugis-Makassar.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, Teori Émile Durkheim sebagaimana yang dikutip oleh Arif (2020) menekankan bahwa pendidikan berperan penting dalam mentransmisikan nilai-nilai kolektif kepada generasi muda. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk cara individu melihat, merasakan, dan bertindak sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial. Lebih lanjut, Teori Durkheim menyatakan bahwa keberlangsungan masyarakat bergantung pada tingkat homogenitas nilai di antara anggotanya, dan pendidikan berfungsi memperkuat homogenitas tersebut sejak dini (Arif, 2020). Dalam kerangka ini, internalisasi nilai kesantunan berbahasa berbasis budaya lokal menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter generasi muda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang "Kesantunan Berbahasa terhadap Nilai Budaya Suku

Bugis-Makassar” menjadi signifikan untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan antara praktik linguistik dan sistem nilai budaya lokal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan

kajian pragmatik dan sociolinguistik berbasis kearifan lokal, serta kontribusi praktis dalam upaya pelestarian nilai budaya melalui pendidikan dan komunikasi sosial.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif berbasis sosiopragmatik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, serta konteks sosial yang melatarbelakangi praktik kesantunan berbahasa dalam masyarakat Bugis-Makassar. Desain deskriptif-interpretatif memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan, tetapi juga menafsirkan keterkaitannya dengan sistem nilai budaya lokal seperti *Sipakatau*, *Sipakalebbi/Siakalabbiri*, *Siri*, dan *Pangngaderreng/Pangngadakkang*. Secara teoretis, analisis didasarkan pada teori kesantunan Penelope Brown dan Stephen C. Levinson (1987) dalam kerangka sosiopragmatik, dengan mempertimbangkan kritik terhadap universalitas konsep *face* sebagaimana dikemukakan oleh Matsumoto (1988;1989) dan Mao (1994). Oleh karena itu, konsep *face* tidak dipahami secara individualistik, melainkan dikontekstualisasikan dengan konsep harga diri kolektif (*siri*) dan kehormatan sosial dalam budaya Bugis-Makassar.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan sebagai pusat kebudayaan Bugis dan Makassar. Subjek penelitian adalah penutur asli

Bugis-Makassar yang aktif menggunakan bahasa Bugis atau Makassar dalam interaksi sosial sehari-hari. Informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan kriteria: 1) berasal dari komunitas Bugis atau Makassar, 2) aktif menggunakan bahasa daerah dalam ranah keluarga atau sosial, 3) mewakili variasi usia (generasi tua dan generasi muda). Pemilihan variasi usia dimaksudkan untuk melihat dinamika pergeseran nilai kesantunan dalam konteks perubahan sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian berupa tuturan lisan yang mengandung praktik kesantunan berbahasa dalam konteks interaksi alami. Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. observasi partisipatif, untuk merekam praktik komunikasi secara langsung dalam situasi keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial informal;
 - b. wawancara semi-terstruktur, untuk menggali persepsi, pemahaman, dan interpretasi informan mengenai konsep kesantunan serta nilai *siri*, *sipakatau*, dan *sipakalebbi*;
 - c. dokumentasi tuturan, berupa pencatatan dan perekaman bentuk sapaan, honorifik, serta strategi komunikasi tidak langsung yang mencerminkan nilai budaya lokal.
- Ketiga teknik tersebut digunakan secara triangulatif untuk memperoleh

data yang komprehensif dan kontekstual.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap dan simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung, dengan beberapa langkah berikut ini.

- a. Reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan praktik kesantunan berbahasa.
- b. Kategorisasi, yakni mengelompokkan bentuk-bentuk strategi kesantunan (misalnya strategi langsung, tidak langsung, penggunaan honorifik, dan sistem sapaan).
- c. Analisis interpretatif, dengan menggunakan kerangka teori kesantunan Brown dan Levinson (1987) untuk mengidentifikasi strategi *positive politeness*, *negative politeness*, dan *off-record strategies*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa dalam masyarakat Bugis-Makassar tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai budaya yang melandasinya. Praktik kebahasaan, khususnya dalam pola sapaan dan pilihan leksikal, merefleksikan struktur sosial, sistem adat, serta konsep kehormatan yang hidup dalam masyarakat.

Pertama, pola sapaan dalam masyarakat Bugis-Makassar secara historis berakar pada sistem stratifikasi sosial (bangsawan, masyarakat umum, dan hamba). Struktur hierarkis ini memengaruhi penggunaan bentuk honorifik seperti *Petta*, *Andi*, *Daeng*, serta partikel kesantunan seperti *-ki'*, *-ta*, dan ungkapan *tabe* serta *iye'*. Meskipun dalam masyarakat kontemporer batas

d. Kontekstualisasi budaya, yaitu menafsirkan temuan berdasarkan nilai budaya Bugis-Makassar, khususnya konsep *siri'* sebagai harga diri kolektif dan mekanisme penjaga kehormatan sosial.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak semata-mata bertumpu pada paradigma kesantunan universal, tetapi juga mempertimbangkan konstruksi nilai lokal yang membentuk praktik komunikasi masyarakat Bugis-Makassar.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, diskusi sejawat (*peer debriefing*), serta pengecekan kembali kepada informan (*member checking*). Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi interpretasi dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

stratifikasi tidak lagi seketat masa lalu, sistem sapaan tetap menjadi indikator penghormatan terhadap usia, status sosial, dan relasi kekerabatan.

Kedua, kesantunan berbahasa dipahami sebagai manifestasi nilai budaya. Dalam perspektif sosiopragmatik, kesantunan tidak semata-mata persoalan linguistik, tetapi merupakan realisasi norma sosial yang bersumber pada sistem nilai seperti *Pangngaderreng/Pangngadakkang*, *Sipakatau*, *Sipakalebbi/Sipakalabbiri*, dan *Siri'*. Nilai-nilai tersebut menuntut setiap individu untuk menjaga martabat diri dan orang lain melalui tutur kata yang pantas dan hormat.

Ketiga, praktik ujaran santun dan tidak santun memperlihatkan sensitivitas pragmatik yang tinggi. Perbedaan bentuk seperti *iye'* dan *iyoy'*, atau penggunaan *iko'* dalam konteks tertentu,

menunjukkan bahwa makna kesantunan ditentukan oleh relasi sosial dan situasi komunikasi. Pelanggaran terhadap norma tutur tidak hanya dipandang sebagai kesalahan bahasa, tetapi juga sebagai pelanggaran nilai budaya dan harga diri (*Siri'*).

Keempat, sistem nilai *Pangngaderreng/Pangngadakkang* berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur tata kehidupan sosial, termasuk etika komunikasi. Unsur *Wari* (kepatutan) secara khusus menekankan pentingnya memahami posisi diri dan lawan tutur dalam interaksi. Dengan demikian, kesantunan berbahasa menjadi bagian integral dari tatanan adat.

Kelima, nilai *Sipakatau* dan *Sipakalebbi/Sipakalabbiri* menegaskan prinsip saling memaanusiakan dan saling memuliakan sebagai fondasi interaksi sosial. Implementasi nilai tersebut tampak dalam penggunaan sapaan hormat, strategi tutur tidak langsung, serta penghindaran bentuk ujaran yang berpotensi merendahkan martabat lawan tutur.

Keenam, konsep *Siri'* menjadi inti sistem nilai Bugis-Makassar yang

menghubungkan bahasa, etika, dan identitas budaya. Kesantunan berbahasa dipandang sebagai bentuk penjagaan kehormatan pribadi dan kolektif. Oleh karena itu, pelanggaran kesantunan dapat berimplikasi sosial dan moral.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran praktik kesantunan di kalangan generasi muda akibat globalisasi, perkembangan media, dan berkurangnya penggunaan bahasa daerah dalam ranah keluarga. Pergeseran ini berpotensi melemahkan internalisasi nilai budaya yang selama ini menjadi landasan etika komunikasi masyarakat Bugis-Makassar.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kesantunan berbahasa dalam masyarakat Bugis-Makassar merupakan representasi konkret dari sistem nilai budaya yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Kajian sosiopragmatik ini memperlihatkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan medium pemeliharaan martabat, identitas, dan kohesi sosial masyarakat Bugis-Makassar.

Pembahasan

3.1. Pola Sapa dalam Suku Bugis-Makassar

Pola sapaan dalam masyarakat Bugis-Makassar tidak dapat dipisahkan dari sistem stratifikasi sosial yang secara historis masih memengaruhi struktur interaksi sosial. Darwis (2008) menjelaskan bahwa dalam masyarakat

Bugis-Makassar dikenal pembagian strata sosial yang meliputi golongan *Arung* (kerabat bangsawan atau keluarga raja), *Tosama* (masyarakat umum), dan *Ata* (golongan hamba atau bawahan). Pembagian ini menunjukkan bahwa relasi sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar bersifat hierarkis dan turut menentukan pilihan bentuk bahasa, termasuk sistem sapaan.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Yatim (1983) yang menyatakan bahwa sistem sapaan dalam masyarakat Bugis-Makassar berkaitan erat dengan struktur sosial yang berlaku. Ia mengklasifikasikan stratifikasi sosial tersebut ke dalam tiga kelompok utama, yakni golongan bangsawan (*karaeng*), golongan masyarakat biasa (*tosama*), dan golongan masyarakat kelas bawah (*ata*). Perbedaan status sosial ini tercermin dalam variasi bentuk sapaan dan penggunaan honorifik yang menunjukkan tingkat penghormatan terhadap mitra tutur.

Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat kontemporer, perbedaan antara golongan menengah dan golongan bawah tidak lagi tampak secara tegas. Perubahan kondisi sosial-ekonomi serta meningkatnya akses pendidikan pada berbagai lapisan masyarakat telah mengaburkan batas-batas stratifikasi tradisional. Banyak keturunan dari golongan nonbangsawan yang kini memiliki tingkat pendidikan dan posisi sosial yang tinggi, sehingga penggunaan sapaan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh garis keturunan, melainkan juga oleh peran dan kedudukan sosial aktual.

Said, I. (1985) menegaskan bahwa pola sapaan dalam bahasa Bugis berkaitan langsung dengan sistem stratifikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik komunikasi, sering dijumpai penggunaan bentuk honorifik seperti *Petta*, *Besse*, dan *Andi* yang secara tradisional dilekatkan pada golongan bangsawan. Namun, dalam perkembangan mutakhir, penggunaan sapaan *Andi* tidak selalu merefleksikan status kebangsawanan secara genealogis, tetapi juga dapat diberikan kepada individu yang berkedudukan,

memiliki jabatan, atau berpengaruh sosial tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem sapaan dalam masyarakat Bugis-Makassar berakar pada struktur stratifikasi sosial yang historis. Gusnawaty (2011) mengidentifikasi beberapa bentuk sapaan santun yang masih produktif digunakan, baik dalam komunitas Bugis maupun Makassar, seperti enklitika *-ki*, ungkapan *iye*, dan *tabe*. Bentuk-bentuk tersebut berfungsi sebagai penanda kesantunan dan penghormatan dalam interaksi sosial, sekaligus mencerminkan internalisasi nilai budaya yang mengedepankan penghargaan terhadap martabat dan hierarki sosial.

3.2. Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa pada hakikatnya dibingkai oleh sistem nilai budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Artinya, suatu tuturan yang dipandang santun dalam satu komunitas belum tentu dimaknai serupa oleh komunitas lain. Perbedaan standar kesantunan tersebut menunjukkan bahwa praktik berbahasa selalu bersifat kontekstual dan berakar pada norma sosial yang dianut penuturnya. Kummer (1992) menegaskan bahwa kesantunan berbahasa merefleksikan kepatuhan individu terhadap nilai-nilai budaya yang berlaku, sehingga penggunaan bahasa tidak sekadar persoalan linguistik, melainkan juga manifestasi etika sosial.

Dalam perspektif antropologi budaya, Koentjaraningrat (2007) mengemukakan bahwa kebudayaan memiliki tiga wujud, yakni (1) sistem ide, gagasan, nilai, norma, dan aturan; (2) pola aktivitas dan tindakan sosial manusia; serta (3) hasil karya material. Jika dikaitkan dengan kesantunan

berbahasa, ketiga wujud tersebut saling berkelindan: nilai dan norma membentuk aturan kesantunan; praktik komunikasi merealisasikan nilai tersebut dalam interaksi; sedangkan bentuk-bentuk sapaan dan simbol honorifik menjadi representasi konkret dari kebudayaan itu sendiri.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat *superorganik*, sebagaimana dikemukakan Herkovits yang dijelaskan kembali oleh Wahid (2010). Kebudayaan dipahami sebagai sistem yang terus hidup dan diwariskan lintas generasi, meskipun anggota masyarakat silih berganti. Dengan demikian, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai pendukungnya. Dalam konteks Bugis-Makassar, sistem sapaan dan praktik kesantunan menjadi bagian integral dari struktur budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Gusnawaty (2011) menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis-Makassar, penggunaan sapaan memiliki dimensi etis yang kuat. Menyebut nama secara langsung dapat dianggap wajar dalam relasi sebaya, tetapi dipandang kurang santun apabila ditujukan kepada guru atau orang yang lebih tua. Demikian pula, bentuk ujaran seperti *iyu* [ya], *aa*, atau *aga* (apa) cenderung dianggap kurang santun dalam situasi formal. Sebaliknya, ungkapan *iye'* dan *tabe* berfungsi sebagai penanda penghormatan dan permohonan izin yang mencerminkan nilai kesantunan halus. Fenomena ini menegaskan bahwa pilihan leksikal dalam bahasa Bugis-Makassar merepresentasikan struktur

nilai yang mengatur relasi sosial.

Sebagai warisan leluhur, nilai budaya Bugis-Makassar termasuk nilai kesantunan berbahasan ditransmisikan melalui keluarga sejak usia dini. Orangtua menanamkan prinsip *sipakatau* (saling menghargai), *sipakainge* (saling mengingatkan), *sipakalebbi* (saling memuliakan), dan *sipakamase* (saling menyayangi) sebagai pedoman interaksi sosial (Hamid, 2003). Nilai-nilai tersebut berkelindan dengan ajaran Islam yang dianut mayoritas masyarakat Bugis-Makassar, sehingga kesantunan dipahami bukan hanya sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai bentuk pengamalan religius.

Namun, dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi telah memengaruhi pola interaksi generasi muda. Pergeseran bahasa dan gaya komunikasi modern berdampak pada perubahan praktik kesantunan. Penggunaan istilah informal seperti *bokap* dan *mace*, serta kecenderungan berbicara secara langsung tanpa strategi tidak langsung, menunjukkan adanya transformasi nilai dalam praktik berbahasa. Penelitian Zaitul Azma (2010) mengindikasikan bahwa konflik komunikasi pada anak dan remaja sering dipicu oleh penggunaan bahasa yang kasar atau kurang santun, yang berpotensi menyinggung perasaan dan merusak relasi sosial.

Fenomena serupa juga terjadi dalam komunitas Bugis-Makassar. Sebagian generasi muda cenderung menggunakan bahasa yang dianggap "standar" menurut perspektif mereka, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan nilai kesantunan tradisional. Gusnawaty

(2011) mencontohkan penggunaan ungkapan *pannassai maksudnu* ('berterus teranglah') yang menunjukkan kecenderungan komunikasi langsung tanpa mempertimbangkan strategi kesantunan tidak langsung yang sebelumnya menjadi ciri khas budaya Bugis-Makassar. Jika kondisi ini berlanjut, terdapat kekhawatiran akan terjadinya erosi identitas kultural yang selama ini menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat dan harga diri (*siri*).

Penelitian terdahulu turut menguatkan indikasi pergeseran tersebut. Said, M (2009) mencatat bahwa penggunaan bahasa daerah Bugis-Makassar dalam interaksi sehari-hari semakin berkurang, bahkan dalam lingkungan keluarga. Madeamin (2015) menemukan bahwa sebagian besar anak muda Bugis hanya memiliki kompetensi reseptif terhadap bahasa daerahnya, yang mengindikasikan status bahasa dalam kondisi *potentially endangered language*. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelestarian bahasa, tetapi juga pada internalisasi nilai kesantunan yang terkandung di dalamnya.

Sibarani (2004) menegaskan bahwa kesantunan berbahasa menjadi isu penting di Indonesia sebagai negara yang tengah mengalami perubahan sosial. Di satu sisi, kesantunan dianggap mulai terabaikan atau disalahpahami sebagai warisan feodal; di sisi lain, kesantunan tetap diperlukan sebagai indikator karakter, sarana memperlancar komunikasi, dan mekanisme menjaga "air muka" dalam interaksi sosial. Bahasa yang santun berfungsi menjaga harmoni, sedangkan bahasa yang mengancam martabat berpotensi memicu konflik.

Dengan demikian, pengaruh

globalisasi dan transformasi budaya terhadap generasi muda Bugis-Makassar tidak hanya berdampak pada pergeseran bahasa, tetapi juga pada pelemahan nilai kesantunan yang berakar pada konsep *Pangngaderreng/Pangngadakkang* dan *siri*. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan sosial karena menyangkut keberlanjutan identitas budaya dan karakter generasi muda. Oleh sebab itu, kajian tentang kesantunan berbahasa dalam perspektif nilai budaya Bugis-Makassar menjadi penting untuk memahami dinamika perubahan sekaligus merumuskan strategi pelestarian nilai kultural dalam praktik komunikasi kontemporer.

3.3. Ucapan Santun dalam Masyarakat Bugis-Makassar

Penggunaan ujaran santun dalam bahasa Bugis-Makassar berkaitan erat dengan sistem nilai budaya masyarakatnya yang menempatkan etika pertuturan sebagai prinsip utama dalam interaksi sosial. Setiap tuturan didasarkan pada nilai kesantunan yang menjadi bagian dari tatanan adat. Agus (2014) menjelaskan bahwa norma kesantunan tersebut terangkum dalam konsep *Adek Makkeada-Ada* sebagai bagian dari nilai *Sipakatau*, yakni prinsip saling menghargai dan memanusaiakan. Selain itu, dikenal pula nilai *Pangngaderreng* (Bugis), *Pangngadakkang* (Makassar), serta *Sipakalebbi* atau *Sipakalabbiri* yang bermakna saling memuliakan. Oleh karena itu, kesantunan dalam masyarakat Bugis-Makassar diwujudkan melalui bahasa verbal maupun nonverbal.

Dalam praktiknya, penghormatan tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata. Masyarakat Bugis-Makassar juga

mengenal gerakan tubuh yang disebut *ajo*, yaitu isyarat penghormatan yang memiliki aturan tertentu. Salah satu bagian tubuh yang sangat dihormati adalah *ulu* (kepala), karena dianggap melambangkan martabat dan harga diri (*siri*). Oleh sebab itu, menyentuh atau memukul kepala dipandang sebagai penghinaan serius. Sebaliknya, gerakan seperti mundur sedikit ketika seseorang melintas di depan kita atau menarik satu kaki ke belakang merupakan bentuk penghormatan yang dianggap santun.

Kesantunan verbal tampak dalam penggunaan ungkapan seperti *tabe*, yang berarti “permisi”. Ungkapan ini digunakan ketika hendak melintas di depan orang lain, terutama yang dihormati, dan biasanya disertai dengan sedikit menundukkan kepala serta menurunkan tangan kanan sebagai tanda hormat. Demikian pula ungkapan *iyé* yang berarti “ya”. Meskipun sederhana, penggunaan *iyé* mencerminkan sikap hormat, terutama jika disertai dengan tundukan kepala ringan. Namun, pengulangan atau gestur yang berlebihan dapat dianggap kurang santun, khususnya dalam situasi resmi.

Perilaku yang menunjukkan sikap tidak menghargai orang lain dikenal sebagai *matempo* dalam bahasa Bugis dan *patoa-toai* dalam bahasa Makassar. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Bugis-Makassar sangat menjunjung nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakalabbiri* sebagai dasar membangun hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, kesantunan berbahasa dan berperilaku merupakan cerminan langsung dari nilai budaya yang mengatur kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

3.4. Ucapan Tidak Santun dalam Masyarakat Bugis-Makassar

Dalam bahasa Bugis-Makassar, pilihan bentuk ujaran memiliki implikasi sosial yang jelas. Misalnya, ungkapan *iyó* yang secara leksikal bermakna “ya” dipandang sebagai bentuk respons yang kurang santun atau bernada kasar dalam konteks tertentu. Apabila seseorang ditanya, “Mauki ikut ke mal?” lalu dijawab dengan *iyó*, respons tersebut dapat dianggap tidak sopan. Sebaliknya, penggunaan *iyé* untuk menyatakan persetujuan dinilai lebih halus dan mencerminkan sikap hormat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesantunan dalam bahasa Bugis-Makassar tidak hanya ditentukan oleh makna, tetapi juga oleh bentuk dan nuansa pragmatik yang melekat pada ujaran.

Demikian pula penggunaan kata *iko* yang berarti “kamu”. Meskipun lazim digunakan dalam lingkungan keluarga atau hubungan akrab, bentuk ini dinilai kurang santun apabila digunakan dalam interaksi sosial yang lebih luas, terutama kepada orang tua atau pihak yang dihormati. Selain *iyó* dan *iko*, beberapa ungkapan lain seperti *aga*, *oii*, dan *hee anu* juga dianggap tidak pantas digunakan dalam situasi formal atau ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Norma ini mencerminkan kuatnya orientasi masyarakat Bugis-Makassar terhadap etika berbahasa dalam menjaga harmoni sosial.

Penanaman nilai kesantunan tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dalam keluarga. Orang tua secara konsisten menasihati anak-anaknya untuk menjaga tutur kata sebagai cerminan martabat diri. Mattulada (1975:9) menjelaskan dalam

pappaseng tau riolota (pesan orang terdahulu) terdapat ungkapan: *Sadda mappabatik ada'* (bunyi melahirkan kata), *Ada mappabbatik gauk* (kata melahirkan perbuatan), dan *Gauk mappabatik tau* (perbuatan membentuk manusia). Ungkapan ini menegaskan bahwa bahasa memiliki kekuatan membentuk tindakan dan, pada akhirnya, karakter seseorang.

Sejalan dengan itu, Gusnawaty (2011) menyatakan bahwa pesan-pesan leluhur yang termuat dalam naskah Lontara secara tradisional disampaikan secara lisan kepada generasi muda. Tujuannya ialah agar anak-anak mewarisi nilai adab bertutur yang santun, karena dalam pandangan orang Bugis-Makassar, kata-kata merupakan pangkal dari tindakan dan harus mencerminkan derajat kemanusiaan. Dengan demikian, nilai *Sipakatau* (saling memanusiaikan), *Sipakalebbi* (Bugis), dan *Sipakalabbiri* (Makassar) menjadi representasi sosial masyarakat Bugis-Makassar dalam menjaga keharmonisan dan kesantunan antarsesama. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berakar pada tradisi adat, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghormati sesama manusia.

3.5 Nilai Budaya Suku Bugis-Makassar

Nilai budaya dalam masyarakat Bugis-Makassar berfungsi sebagai pedoman utama dalam berperilaku dan bertindak. Nilai-nilai tersebut tetap dipandang relevan karena mengandung makna yang berkaitan erat dengan perjalanan sejarah dan dinamika sosial masyarakat Bugis-Makassar (Rahim, 2011). Dengan demikian, nilai budaya tidak hanya dipahami sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai landasan normatif yang mengarahkan pola

interaksi sosial hingga masa kini.

Salah satu sistem nilai yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bugis-Makassar adalah *Pangngaderreng* (dalam bahasa Bugis) atau *Pangngadakkang* (dalam bahasa Makassar). Sistem norma ini mengatur tata kehidupan sosial, termasuk cara seseorang membawa diri secara pantas dalam masyarakat. Di dalamnya terkandung nilai *Sipakatau* atau *Sipakaraja* yang bermakna saling menghargai sesama manusia yang memiliki martabat. Selain itu, terdapat pula nilai *Sipakalebbi* (Bugis) atau *Sipakalabbiri* (Makassar) yang bermakna saling memuliakan. Nilai-nilai tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial.

Secara konseptual, hubungan antara manusia dan nilai, termasuk etika dan agama bersifat tidak terpisahkan. Wahid (2010) menegaskan bahwa etika dan agama merupakan unsur fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memerlukan nilai sebagai landasan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam praktik berbahasa santun. Dalam konteks ini, pemilihan kata, bentuk kalimat, serta ragam bahasa menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Sejalan dengan itu, Puteh (1996) menyatakan bahwa nilai merupakan rujukan normatif yang dijadikan pedoman tingkah laku oleh anggota suatu masyarakat atau kelompok budaya tertentu. Pandangan tersebut diperkuat oleh Gu (1990) yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat Tiongkok modern, bahasa dan budaya tidak hanya berfungsi secara instrumental, tetapi juga memiliki dimensi normatif. Kegagalan mematuhi prinsip kesantunan

dapat menimbulkan konsekuensi sosial. Meskipun setiap masyarakat memiliki formulasi nilai yang berbeda, prinsip dasar mengenai pentingnya kesantunan bersifat universal.

Dengan demikian, perilaku santun dalam berbahasa memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai budaya; keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahasa merefleksikan budaya, sementara budaya menyediakan seperangkat nilai dan prinsip yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat penutur sehingga menjadi pedoman dalam interaksi sosial (Achmad, 2012). Pendapat serupa dikemukakan oleh Mahmud (2010) yang menyatakan bahwa kesantunan dalam bahasa Bugis merupakan bagian integral dari budaya masyarakat Bugis itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa praktik kesantunan berbahasa bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan manifestasi dari sistem nilai budaya yang hidup dan diinternalisasi dalam masyarakat Bugis-Makassar.

3.6. Pangngaderreng (Bahasa Bugis) atau Nilai Pangngadakkang (Bahasa Makassar)

Pangngaderreng (Bugis) atau *Pangngadakkang* (Makassar) merupakan sistem norma dan aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Sistem ini mencakup lima unsur utama, yaitu *Ade* (tata pemerintahan), *Bicara* (peradilan), *Rappang* (preseden atau rujukan pengetahuan), *Wari* (kepatutan dalam relasi sosial), dan *Sara* (kepatuhan terhadap syariat Islam). Kelima unsur tersebut membentuk kerangka nilai yang mengatur tertib sosial sekaligus menjadi pedoman etis dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai wujud kebudayaan, *Pangngaderreng/Pangngadakkang* tidak hanya berisi aturan formal, tetapi juga mengandung nilai moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik material maupun nonmaterial. Wahid (1992) menegaskan bahwa sistem ini mengandung makna penghormatan terhadap manusia dan segala sesuatu yang dianggap luhur dalam arti luas. Dengan demikian, adat-istiadat dipahami sebagai himpunan kaidah sosial yang telah mengakar lama dan berfungsi menetapkan tata tertib masyarakat.

Dalam praktik kebahasaan, nilai tersebut tercermin dalam sistem sapaan. Penggunaan sapaan bergantung pada usia, status sosial, dan tingkat kekerabatan. Bentuk sapaan santun seperti *Daeng*, *Iye*, *Tabé*, *Idi*, serta partikel *-ki'*, *-ta*, *-mi*, dan *-mo* berfungsi menegaskan penghormatan kepada lawan tutur. Sapaan ini menjadi indikator awal penilaian kesantunan dalam komunikasi masyarakat Bugis-Makassar karena mengandung filosofi saling menghargai.

Sebaliknya, penggunaan bentuk seperti *ko*, *iyo*, atau *aa* dalam situasi yang tidak tepat dinilai kurang santun dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Misalnya, ungkapan "He, ambilko dulu buku saya" dianggap tidak sopan. Bentuk tersebut seharusnya diganti dengan tuturan yang lebih santun, seperti "Iye tabé, bisaki ambilkanka bukuku yang ada di dekatta." Namun demikian, Yassi (2012) menjelaskan bahwa bentuk seperti *ko* atau *iyo* dapat digunakan dalam konteks tertentu, misalnya oleh bangsawan, orang tua kepada anak, atau suami kepada istri. Artinya, penggunaannya

bergantung pada relasi kuasa dan situasi komunikasi.

Madeamin (2015) menambahkan bahwa dalam kerangka *Pangngaderreng*, bahasa termasuk dalam unsur *Wari*, yaitu asas kepatutan (*mappasitinaja*) dan pembedaan sosial (*mappallaiseng*). Masyarakat Bugis-Makassar mengenal susun lapis sosial, sehingga setiap penutur dituntut memahami posisi dirinya dan lawan tutur. Prinsip ini menegaskan bahwa kesantunan berbahasa harus mempertimbangkan kepada siapa, dalam situasi apa, dan dalam konteks sosial bagaimana tuturan disampaikan. Dengan demikian, sistem *Pangngaderreng/Pangngadakkang* tidak hanya mengatur tata sosial secara umum, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam praktik komunikasi yang santun dan beradab.

3.7. Nilai Sipakatau Atau Sipakaraja

Nilai *Sipakatau* merupakan prinsip dasar dalam budaya Bugis-Makassar yang menempatkan setiap manusia sebagai pribadi yang harus diperlakukan secara manusiawi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, kondisi fisik, atau latar belakangnya, memiliki martabat yang patut dihormati. Oleh karena itu, memperlakukan orang lain secara tidak layak dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai budaya yang dijunjung tinggi. Dalam kerangka ini, seseorang dituntut memperlakukan orang lain sebagaimana ia memandang dan menghargai dirinya sendiri sebagai manusia yang bermartabat.

Sebagai nilai budaya, *Sipakatau* berakar pada konsep *tau* (manusia) yang menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis-Makassar. Konsep ini menekankan

pentingnya saling memahami dan menghargai dalam setiap interaksi sosial. Mattulada (1991) menyatakan bahwa penerapan nilai *Sipakatau* dapat melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat serta memungkinkan berbagai aktivitas sosial berlangsung sesuai dengan derajat dan martabat manusia. Dengan demikian, *Sipakatau* bukan sekadar norma etis, melainkan fondasi moral yang menopang keteraturan dan keharmonisan sosial masyarakat Bugis-Makassar.

3.8. Nilai Sipakalebba (BB) atau Nilai Sipakalabbiri (BM)

Nilai *Sipakalebba* (Bugis) atau *Sipakalabbiri* (Makassar) menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan layak diperlakukan dengan penghormatan. Prinsip ini mendorong setiap individu untuk memandang orang lain secara positif, dengan menonjolkan kelebihan yang dimilikinya, bukan sekadar melihat kekurangannya. Kesadaran bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan menjadi dasar bagi terciptanya sikap saling memuliakan. Dalam praktik sosial, perlakuan yang baik dan penghargaan terhadap sesama diyakini mampu menciptakan suasana harmonis dan memperkuat solidaritas sosial.

Mattulada (2022) menegaskan bahwa nilai *Sipakatau* (Bugis) atau *Sipakalabbiri* (Makassar) mengandung makna penghargaan terhadap setiap manusia tanpa membedakan strata sosial maupun kondisi fisik. Harkat dan martabat seseorang harus dijaga sebagaimana seseorang menjaga martabat dirinya sendiri. Melalui internalisasi nilai tersebut, kehidupan sosial dapat berlangsung secara harmonis karena setiap individu

diperlakukan sesuai dengan derajat kemanusiaannya.

Nilai ini tercermin dalam praktik kesantunan berbahasa Bugis-Makassar, seperti penggunaan sapaan *Daeng*, *Iye*, *Tabe*, *Idi*, serta partikel *-mi*, *-mo*, *-ki*, dan *-ta*. Bentuk-bentuk tersebut bukan sekadar unsur linguistik, melainkan representasi sikap saling menghargai, menjaga martabat, dan memahami posisi lawan tutur dalam interaksi sosial. Dengan demikian, kesantunan berbahasa menjadi manifestasi konkret dari nilai *Sipakalebbi/Sipakalabbiri* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

3.9. Nilai Siri

Dalam kajian budaya Bugis-Makassar, konsep *Siri'* merupakan unsur fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai masyarakatnya. Rahim (2011) menegaskan bahwa *Siri'* harus ditegakkan secara resiprokal, yakni menjadi kewajiban bersama dalam relasi sosial, bukan hanya tanggung jawab sepihak. Prinsip ini tercermin dalam naskah Lontara yang menekankan pentingnya saling menjaga kehormatan, baik dalam relasi suami-istri maupun antara pemimpin dan rakyat. Dengan demikian, *Siri'* berfungsi sebagai mekanisme moral untuk menjaga martabat individu dan harmoni sosial.

Beragam ungkapan tradisional menegaskan sentralitas *Siri'* dalam kehidupan Bugis-Makassar. Ungkapan *Siri'emmi ri onroang ri lino* bermakna bahwa hanya dengan *Siri'* seseorang dianggap benar-benar hidup; kehilangan *Siri'* disamakan dengan kehilangan makna hidup. Istilah *Napatettongngi Siri'na* berarti menegaskan kembali harga diri, sedangkan *Mate Siri'* merujuk

pada kesediaan mempertaruhkan nyawa demi kehormatan. Sebaliknya, *Matei Siri'na* menggambarkan kondisi hilangnya martabat seseorang. Konsep ini menunjukkan bahwa *Siri'* bukan sekadar rasa malu, melainkan kesadaran mendalam akan harga diri dan kehormatan.

Nilai *Siri'* terintegrasi dengan prinsip *Sipakatau*, *Sipakalebbi/Sipakalabbiri*, dan *Pangngaderreng/Pangngadakkang*. Keseluruhan sistem nilai ini mengatur perilaku sosial, termasuk etika berbahasa. Pelanggaran terhadap kesantunan dapat dipersepsi sebagai pelanggaran terhadap *Siri'*, yang berpotensi menimbulkan konflik serius. Oleh sebab itu, penutur Bugis-Makassar dituntut mampu menempatkan diri secara tepat dalam bertutur guna menjaga martabat diri dan orang lain.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa berakar kuat pada nilai budaya. Watts (2011) membedakan antara perilaku normatif dan perilaku santun; kesantunan berada pada tataran yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan terhadap norma. Kummer (1992) menegaskan bahwa bentuk kesantunan tidak bersifat universal, melainkan dibentuk oleh latar sosial dan budaya tertentu. Dalam konteks Bugis-Makassar, kesantunan berbahasa mencerminkan internalisasi nilai *Siri'* dan sistem adat yang melandasinya.

Namun, beberapa penelitian (Agus, 2011); Madeamin, 2017) menunjukkan adanya pergeseran praktik kesantunan akibat perubahan sosial dan pengaruh media. Penurunan pemahaman terhadap nilai budaya turut melemahkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap

bahasa daerah. Padahal, Rahim, 2011) menegaskan bahwa nilai budaya Bugis berfungsi sebagai pedoman perilaku dan penjaga kehormatan diri. Pelanggaran terhadap nilai tersebut bukan hanya berdampak sosial, tetapi juga moral, karena menyentuh inti harga diri individu

dan komunitasnya. Dengan demikian, *Siri'* sebagai sistem nilai budaya tidak hanya berfungsi menjaga martabat individu, tetapi juga menjadi landasan etika komunikasi dan kohesi sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar.

SIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat Bugis dan Makassar memiliki perbedaan seperti dalam menggunakan bahasa. Masyarakat Bugis menggunakan bahasa Bugis dalam berkomunikasi. Masyarakat Makassar menggunakan bahasa Makassar. walaupun kedua dua masyarakat ini sebenarnya memiliki kesamaan kerana pada dasarnya mereka adalah satu, yaitu Bugis-Makassar.

Bahasa Bugis dan bahasa Makassar memiliki sistem tulisan yang sama, yakni aksara Bugis-Makassar yang dikenal sebagai aksara Lontara. Penggunaan aksara ini telah berlangsung sejak abad ke-16, yakni sebelum Islam dianut secara luas oleh masyarakat Bugis dan Makassar.

Naskah Lontara memuat berbagai ajaran dan nasihat yang menjadi pedoman hidup masyarakat Bugis-Makassar. Kandungan ajaran tersebut berfungsi sebagai falsafah hidup yang mengatur nilai, norma, dan perilaku sosial. Salah satu naskah Lontara yang berkaitan dengan adab bertutur ialah

Adek Makkeada-ada, yaitu aturan yang mengatur tata cara dan etika dalam berkomunikasi. Naskah ini telah menjadi bagian dari nilai budaya yang diwariskan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Tata cara berbahasa seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianut oleh suku, bangsa, atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, terdapat berbagai nilai budaya yang menjadi pedoman perilaku, termasuk dalam berbahasa. Selain nilai *Sipakatau* (saling memanusaiakan), *Sipakalebbi* (Bugis) atau *Sipakalabbiri* (Makassar) (saling menghargai), serta *Pangngaderreng* (Bugis) atau *Pangngadakkang* (Makassar) yang dijadikan asas dalam kajian ini, terdapat pula nilai-nilai lain seperti *Siri' na Pacce*, *Allengpureng* (kejujuran), *Assitinajang* (kepatutan), *Agattengeng* (keteguhan), *Reso* (usaha), dan *Siri'* (malu atau harga diri). Nilai-nilai budaya tersebut telah lama dijadikan pedoman oleh para leluhur masyarakat Bugis-Makassar dalam mengatur kehidupan sosial mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, Syarifuddin (2012) "Strategi kesopanan berbahasa masyarakat Bugis Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan," *Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya*: Vol. 40: No. 1, Article 1. DOI: <https://doi.org/10.17977/um015v40i12012p1-13>
- Agus, Nuraidar. (2012). Perilaku Berbahasa Daerah Kaum Remaja di Sulawesi Selatan:

- Sebuah Rekonstruksi Menuju Pemartabatan Nilai Kesantunan Berbahasa. Makalah Kongres Internasional Bahasa Daerah II di Makassar. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
- Arif, A. M. (2020). PERSPEKTIF TEORI SOSIAL EMILE DURKHEIM DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1-14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.28>
- Darwis, M. (2008). Reorien-tation of Social Strata in Buginese Community. A Sociolinguistic Analysis. *Jurnal Buletin Penelitian Universitas Hasanuddin*, 7.
- Gusnawaty, G. (2011). Perilaku Kesantunan dalam Bahasa Bugis. *Makassar: Universitas Hasanuddin*.
- Gu, Y. (1990). Politeness phenomena in modern Chinese. *Journal of pragmatics*, 14(2), 237-257.
- Haugh, M. (2003). Anticipated versus inferred politeness. *Multilingua*, 22(4), 397-413.
- Kummer, M. (1992). *Politeness in Thai*. na.
- Laini, N., & Budiyo, S. C. (2025). Kesantunan Berbahasa dalam Novel Candra Kirana Karya Ajip Rosidi : Kajian Pragmatik. *Journal of Education Research*, 6(3), 518–530. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2366>
- Madeamin, R. (2015). Pergeseran Bahasa Bugis di Sulawesi Selatan. *Buginese Language Shift in South Sulawesi*. PhD diss., Hasanuddin University, Makassar, Indonesia.
- Mahmud, M. (2010). Politeness in Bugis: A Study in Linguistic Anthropology Volume I and II. *Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar*.
- Matsumoto, Y. (1988). Reexamination of the universality of face: Politeness phenomena in Japanese. *Journal of pragmatics*, 12(4), 403-426. [https://doi.org/10.1016/0378-2166\(88\)90003-3](https://doi.org/10.1016/0378-2166(88)90003-3)
- Matsumoto, Y. (1989). Politeness and conversational universals—observations from Japanese.
- Mattulada, L. (1975). Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologis Orang Bugis. *Universitas Indonesia Disertasi, Jakarta*, 333.
- Mattulada. (1991). *Menyusuri jejak kehadiran Makassar dalam sejarah, 1510-1700*. Hasanuddin University Press.
- Mattulada, H. (2022). Manusia dan Kebudayaan Bugis Makassar dan Kaili di Sulawesi. *LOBO: Annals of Sulawesi Research*, 6(S7).
- Penelope Brown, & Levinson, S. C. (1978). export_endnote. In *Universals in language usage: Politeness phenomena*. In *Questions and politeness: Strategies in social interaction* (hal. 56–311). Cambridge University Press. https://pure.mpg.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_66660
- Puteh, Othman. (1996). Konsep nilai dalam kesusasteraan Melayu. In *Sitti Aisyah Murad*

- (Ed), pengenalan (pp. vii-xviii) Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Rahim, Rahman. (2011). Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Room, R., & Syukriady, D. (2024). Sapaan Santun 'Iye' Dan 'Tabe' Dalam Falsafah Budaya Bugis-Makassar. *ISOLEK: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Bahasa, dan Sastra*, 2(2), 344–355. <https://doi.org/10.59638/isolek.v2i2.412>
- Said, Ide. (1985). Subsistem honorifik bahasa Bugis: Sebuah kajian sosiolinguistik.
- Sibarani, R. (2004). *Antropolinguistik: Antropologi linguistik, linguistik antropologi*. Poda.
- Taufiq, A. M., Amar, M. A., & Sukarni, S. (2026). STRATEGI KESANTUNAN DAN REALISASI TINDAK TUTUR DALAM INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT BUGIS : KAJIAN SOSIOPRAGMATIK. *Panthera : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains Dan Terapan*, 6(1), 383–390. <https://doi.org/10.36312/panthera.v6i1.959>
- Wahid, S. (1992). Metafora Bahasa Makassar. *Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar*.
- Wahid, S. (2010). Manusia Makassar. Penerbit. Refleksi. Makassar.
- Watts. R. J. (2003). Politeness. Key topics in sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yassi, Abd. Hakim. (2012). Model sistem kesantunan bahasa Makassar: mengkaji keuniversalitasan teori kesantunan Brown & Levinson. Hasil penyelidikan. Dibentangkan dalam Kongres Internasional Bahasa Daerah II di Makassar. Sulawesi Selatan.
- Yatim, N. (1983). Subsistem honorifik bahasa Makassar: sebuah analisis sosiolinguistik. *Intanmas.1601*. <https://search.informit.org/doi/10.3316/intanmas.1601>